

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENINGKATAN TRANPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SEMARAS KABUPATEN KOTABARU

Ana Hayani¹, Sitna Hajar Melawat², Lieta Dwi Noviyanti³

Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, 19120102

Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, 11 1305 9101

Ilmu Administrasi Publik, 11 2611 7420

ABSTRAK

Ana Hayani, 19120102. 2023 : Implementasi Kebijakan Program Layanan Sistem Keuangan Desa Dalam Peningkatan Transparansi Di Desa Semaras Kabupaten Kotabaru. Sitna Hajar Malawat, Lieta Dwi Novianti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan di Desa Semaras, Kabupaten Kotabaru dengan mengkaji kebijakan yang diterapkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat implementasinya dalam konteks program pelayanan sistem keuangan desa.

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dalam studi ini, kami menggunakan kerangka kerja Edward III untuk menerapkan kebijakan. Sumber primer dan sekunder digunakan untuk mengisi kesenjangan data. Pengumpulan informasi dengan cara observasi, wawancara, dan catatan tertulis. Lima orang, termasuk kepala desa, sekretaris, petugas keuangan, dan dua warga, berpartisipasi sebagai narasumber. Reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan merupakan semua proses dalam proses analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Layanan Sistem Keuangan Desa Dalam Peningkatan Transparansi di Desa Semaras dilihat empat indikator dikatakan berjalan dengan baik, walaupun belum optimal berdasarkan analisis dari indikator sumber daya dan disposisi. Sumber daya masih terdapat kekurangan dalam membuat laporan keuangan minimnya pengetahuan menggunakan siskeudes, sedangkan indikator disposisi terdapat kekurangan, bahwa aparatur menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan tupoksinya, sedangkan dua indikator komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Dari segi transparan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dikatakan baik, dalam pengelolaan keuangan selalu dipantau dari kabupaten ataupun penegak hukum seperti KPK, BPK, dan masyarakat yang memantau dari baliho. Faktor penghambatnya yaitu jaringan internet yang kurang stabil, dan sumber daya manusia masih belum dapat maksimal dalam mengelola keuangan sehingga diperlukannya pelatihan-pelatihan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Siskeudes, Transparansi

ABSTRACT

Ana Hayani, 19120102. 2023 : Implementation Village Financial System Service Program Policies In Increasing The Transparency Of Financial Management In Semaras Village Kotabaru Regency. Sitna Hajar Malawat, Lieta Dwi Novianti.

This study aims to increase financial transparency in Semaras village, Kotabaru district by examining the policies implemented and identifying the issues that impede their implementation within the context of the village financial system service programme.

Descriptive qualitative methods are used in this study. In this study, we use Edward III's framework for putting policy into effect. Primary and secondary sources were used to fill in the data gaps. Collecting information by means of observation, interviews, and written records. Five persons, including the village chief, secretary, finance officer, and two residents, participated as interviewees. Reducing data, presenting data, and making conclusions are all processes in the data analysis process.

The results of the research show that the Implementation of the Village Financial System Service Program Policy in Increasing Transparency in Semaras Village, from the four indicators, is quite good because based on an analysis of the communication indicators, it has gone well, indicators of resources have deficiencies in making financial reports due to lack of knowledge in using diskettes, while the disposition indicators are lacking, the apparatus does not carry out their duties by the main tasks and functions, and the indicators of the bureaucratic structure are running well according to the SOP. In terms of transparency in managing village finances, it has been said to be good, because financial management is always monitored by the district or law enforcers such as the KPK, BPK, and the community monitors from billboards. Inhibiting factors, namely the internet network which is unstable, and human resources that are still not optimal in managing finances training is needed.

Keywords: *Policy Implementation, Siskeudes, Transparency*

REFERENSI

- 2-Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia. (N.D.).
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- M.Pd, M., & M.Ag, D. L. (2017). *Metologi Penelitian ; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi, Jawa Barat: Cv Jejak.
- Tesar Walean, M. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Jurnal Governance*, 1 No 2.
- Prof. Dr. H. Mukhtar, M. P., Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, S. S. M. A., & Dr. Sakban, M. A. (2018). *Analisi Kebijakan Pendidikan Standar Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah*.
- Karjono, K. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Ibda Hamidulloh, Ed.).
- Albi Anggito & Johan Setiawan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (E. D. Lestari, Ed.) Jawa barat.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar.
- Berita Negara Republik Indonesia*. (n.d.). www.peraturan.go.id